

PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH UNIVERSITAS BATAM

**MODUL MATA KULIAH
INTEGRASI KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN**

**DOSEN (TIM TEACING 1):
Dr. Mohd. Yusri, M.Si
NIDN: 0104126002**

Universitas Batam || Let's challenge the
future!

**SEMESTER GENAP
22/23**

POKOK BAHASAN 1 : MEMAHAMI ARTI INTEGRASI KEBIJAKAN

Salah satu hal logis yang seharusnya diterapkan dalam perencanaan strategis adalah integrasi seluruh unit yang bertanggung jawab pada bidang perencanaan (*strategic planning team*) (Bryson dan Roering, 1988).

Integrasi kebijakan dapat dilihat sebagai sesuatu yang berkaitan dengan proses kebijakan atau keluaran kebijakan (Nilsson & Persson, 2003; Persson, 2004).

Perbedaan antara proses dan keluaran dapat menjadi tantangan karena keduanya tidak selalu dapat dipisahkan dengan jelas. Apa yang termasuk dalam proses dan apa yang termasuk dalam keluaran mungkin juga bergantung pada perspektif.

Dimensi ketiga yang sering kali berperan adalah hasil kebijakan, yaitu, perubahan aktual dalam perilaku yang dirangsang oleh suatu kebijakan. Secara teknis, integrasi kebijakan hanya tercapai jika keluaran yang terintegrasi akhirnya diimplementasikan dan menghasilkan perubahan substansial dalam perilaku.

Terkait dengan aspek ini, titik intervensi juga merupakan dimensi penting yang perlu dipertimbangkan. Hal ini didasarkan pada pandangan pembuatan kebijakan sebagai proses siklus penetapan agenda, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, dan evaluasi (Howlett & Ramesh, 2003).

Perbedaan Perencanaan dan Kebijakan

▫ Kebijakan

Adalah aturan tertulis yang bersifat mengikat yang merupakan putusan organisasi untuk menciptakan tatanan baru dalam masyarakat (Ndun, 199)

Kebijakan adalah pedoman/serangkaian prinsip yang memandu otoritas terkait dalam tindakannya.

Kebijakan adalah pedoman untuk mencapai tujuan
kebijakan adalah seperangkat aturan dan peraturan

- Perencanaan

Rencana adalah peta jalan untuk mencapai tujuan

Perencanaan adalah tentang membuat rencana tentang cara mencapai tujuan.

Rencana adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk masa depan.

Metode Integrasi

Untuk mencapai integrasi kebijakan yang lebih baik , para pembuat kebijakan harus memiliki informasi yang cukup mengenai:
masalah apa yang ada di antara berbagai sektor,
implikasi apa yang ditimbulkannya,
dan berapa biaya yang diperlukan untuk menyelesaikannya.

Dua metode untuk mencapai integrasi telah disarankan:

- (1) metode langsung, seperti arahan kebijakan khusus bagi lembaga pemerintah untuk diikuti; dan
- (2) metode tidak langsung, seperti strategi intelektual yang mengupayakan integrasi kebijakan melalui inisiasi penelitian, pelatihan, dan sosialisasi, yang bertujuan untuk mengembangkan perspektif yang lebih komprehensif dan holistik di pihak para pembuat keputusan, atau strategi kelembagaan, yang melibatkan beberapa jenis perubahan organisasi.
- (3) Integrasi kebijakan dianggap sebagai cara penting untuk mengatur permasalahan kebijakan lintas sektoral secara efektif.

(4) Dalam konteks adaptasi perubahan iklim misalnya, baru-baru ini muncul seruan untuk memperkuat integrasi kebijakan untuk memastikan tindakan yang tepat waktu, memadai dan efektif. (Robert Biesbroke dalam Environmental Sustainability 2021)

Integrasi kebijakan sebagian besar dilihat sebagai suatu hasil sesuatu yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam rangka menangani isu-isu kebijakan lintas sektoral.

Kebijakan sektoral adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditujukan pada sektor-sektor tertentu. setiap bidang/bagian mengeluarkan kebijakan sendiri untuk sektornya, seperti keuangan, distribusi, produksi, tata niaga, ketenaga kerjaan dan sebagainya.

Oleh karena itu derajat integrasi kebijakan bergantung pada bagaimana masalah tersebut berkembang

Beberapa Masalah Integrasi Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan

perencanaan yang tidak terintegrasi

dapat memicu adanya standar ganda dalam eksekusi strategi .organisasi menjadi tidak konsisten

dari sisi penganggaran

adanya strategi-strategi yang tidak didanai'

terdapat kegiatan yang tidak dianggarkan sama sekali.

adanya ketidakselarasan antara rencana strategis dan kontrak kinerja

rencana Strategis yang disusun untuk periode lima tahunan.

Lingkungan stratejik domestik dan internasional

Yaitu dihadapkan pada batasan-batasan terhadap kiprah perencanaan dalam mendorong pembangunan masa depan yang lebih baik

Anggapan bahwa lembaga perencanaan pembangunan tidak diperlukan

karena keberadaannya selama ini hanya memperpanjang jalur alokasi sumber-sumber yang bukan merupakan tanggung jawabnya yang hakiki

In efisiensi Kebijakan

menimbulkan dampak negatif dalam peningkatan efisiensi anggaran. Dan perencanaan pembangunan belum juga menggemakan suatu irama yang membangkitkan.

Pertemuan ke 2: SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI, POLITIK.

Ada 5 (lima) Perubahan Besar dalam Sistem Perencanaan Indonesia

Pertama, Hilangnya Peran MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dan Menguatnya peran DPR

Kedua, Hilangnya GBHN sebagai “Induk” pembangunan dan “induk” ekonomi politik”.

Ketiga, Pemilihan langsung Presiden, sehingga bukan lagi mandataris MPR (Presiden tdk bertanggung jawab ke MPR) sebaga wujud V-M-P

Selanjutnya®

Keempat, Pemilihan KDH Prov./Bup/Wa V-M-P Gub, Bup, Wa

Kelima, Menguatnya desentralisasi dan Otonomi Daerah

Kelima, Issu Pengaruh Perubahan Iklim yang mau tidak mau, suka tidak suka Indonesia meratifikasi dari putusan organisasi2 Dunia

Perencanaan dan Kebijakan lebih berorientasi Politik dan Ekonomi

Implikasinya:

1. Keberlanjutan Pembangunan (sustainability Development)
2. Siapa pengambil keputusan dan bagaimana konsensus politik Nasional dalam bentuk Perencanaan Pembangunan jangka panjang (20-25 Tahunan), jangka menengah (15 Tahunan) dan Jangka Pendek (5 tahunan)
3. Tidak ada jaminan apakah setiap parpol pengusung benar-benar akan siap dengan perencanaan Pembangunan disemua level apabila menang dalam kontestasi tsb.

PRASYARAT SUKSESNYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN PERENCANAAN PERSEPEKTIF EKONOMI BARU.

- 1. *Sustainable development* merlukan sarat stabilitas politik dan pemerintahan dengan model “equilibrium baru”
- 2. Perlu membangun format baru dalam sistem “multy Party” yaitu kerjasama partai dengan platform, visi dan Misi
- 3. Konfederasi partai permanen menjamin stabilitas dan mayoritas efektif di eksekutif dan legislatif.

(Seperti model Barnas Malaysia bertumpu pada Partai Melayu/UMNO, Partai Cina/MCA, Partai India/MIC dll).

Fokus Perencanaan berbasis ekonomi dan Politik

A. Paradigma Baru

1. **Integrasi penduduk dan pembangunan berpusat kepada manusia**
2. **The centralisasi dan otonomisasi**
3. **Democratic Govortment**

B. Employment Based Economy (EBE)

1. Manusia sebagai titik sentra

Sinergi ekonomi pasar dan kelembagaan

C. Prioritas

1. Sejalan employment pendidikan

2. Sinergi hub Industrial

D. Reformasi Konkrit. Ekonomi politik, makro dan mikro

Siklus Kebijakan dan Perencanaan thd Perubahan Iklim

Kebijakan Perencanaan pembangunan menghadapi tuntutan untuk dapat bersikap lebih arif .

- 1. kebijakan perencanaan**
- 2. berbagai peluang dan tantangan perubahan iklim**
- 3. langkah-langkah kebijakan**
- 4. perubahan kondisi yang diharapkan**

Perubahan Iklim Terhadap Politik Kebijakan

Contoh kasus pada tahun 2019, dimana sebagian besar negara bagian di Australia menghadapi kebakaran hutan

pada 2009 kebakaran juga menimpa negara bagian Victoria dengan korban jiwa 180 orang. <https://news.detik.com/kolom/d-4861134/politik-perubahan-iklim>.

Publik di Australia menjadi gusar terhadap pemerintahan PM Scott Morrison Morrison yang dianggap lambat dalam penanganan bencana

Kritik yang dilancarkan oleh publik Australia tidak hanya ditujukan bagi kebijakan jangka pendek dan bersifat taktis, tapi juga kepada kebijakan pemerintah Australia terhadap perubahan iklim (*climate change*) secara umum

Contoh kasus pada tahun 2019, dimana sebagian besar negara bagian di Australia menghadapi kebakaran hutan

pada 2009 kebakaran juga menimpa negara bagian Victoria dengan korban jiwa 180 orang. <https://news.detik.com/kolom/d-4861134/politik-perubahan-iklim>.

Pemerintah Australia dianggap enggan mengambil langkah2 kebijakan strategis

Para senator terbelah, ada yang mempertahankan energi fosil, sebagian cenderung menggunakan energi ramah lingkungan lagi.

Di Australia, keterbelahan terjadi antara Partai Liberal, partai PM Scott Morrison mendukung penggunaan energi Fossil, dengan Partai Labour yang mendukung energi ramah lingkungan

Contoh kasus lain yakni di Amerika (setiap tahun terjadi Kebakaran Hutan)

Pada masa Presiden Tump. Presiden Trump yang menyebut *climate change* sebagai *hoax* dan berkeinginan untuk menarik mundur AS dari Perjanjian Paris.

Pemerintah Amerika menganggap pengurangan emisi memakan biaya besar

Ada kecenderungan keinginannya untuk memajukan industri batu bara AS yang tersaingi oleh gas alam

Partai Demokrat mengambil posisi mendukung isu perubahan iklim ini sebagai kebijakan utama untuk presiden dan kongres seperti yang ditunjukkan oleh survei Pew Research Center pada 2018.

Kecenderungan partisan ini pada akhirnya sangat merugikan kemajuan penanganan masalah perubahan iklim karena sikap publik terhadap isu lingkungan menjadi terbelah berdasarkan afiliasi politik.

BAGAIMANA INDONESIA?

KOMITMEN INDONESIA

Indonesia merupakan kerentanan yang tinggi terhadap perubahan iklim (*climate change*), OKI:

- Konferensi Perubahan Iklim Ke 13 PBB pada 2007 merumuskan Bali Road Map.
- Sebelumnya juga Indonesia berkomitmen menurunkan emisi 29 % tanpa bantuan dan menurunkan 41 persen dengan bantuan LN sd tahun 2030
- **Politisasi Kebijakannya Adalah:**
- Terjadi benturan antara MUE di tahun 2019 lalu
- -MUE menghendaki larangan sawit sebagai energi terbarukan (terjadi pembakaran dan kebakaran hutan untuk ekspansi)
- -Indonesia menganggap Uni Eropa ingin memproteksi minyak bunga matahari sebagai bahan baku energi terbarukan.
- Kecenderungan lain bahwa Indonesia masih memiliki cadangan yang besar sumber Batu Bara.
- Cadangan batubara Indonesia mencapai 26,2 miliar ton. Dengan produksi batubara sebesar 461 juta ton tahun 2019 (Badan Geologi Kementrian ESDM. 2020), maka umur cadangan batubara masih 56 tahun apabila diasumsikan tidak ada temuan cadangan baru.
- Sementara aktifis lingkungan menuduh eksploitasi Batubara sebagai penyebab polusi

Data Kekayaan Batu Bara Indonesi

A

No	Tahun	Pemanfaatan Dalam Negri/Ton/Pemanfaatan	Pemanfatan Luar Negri/Ton
1	2013	72 Juta Ton	Cina 51 juta ton
2	2014	76 juta ton	India 46 juta ton
3	2015	▫ 86 juta ton	Jepang 22 juta ton

4	2016	91 juta ton	Negara lain 26 juta ton
5	2017	97 ton/Kelistrikan 86%, 16 % briket dll Sumber: ESDM 2019, diolah	

Penggunaan Batubara sebagai Bahan Energi Dalam dan Luar Negri

No	Tahun	Pemanfaatan Dalam Negri/Ton/Pemanfaatan	Pemanfatan Luar Negri/Ton
1.	Kalimantan	14,9 milyar	Kaltim; 7,5 M, Kalsel 4,2 M, Kalteng 2,1 M

2	Sumatera	11,2 miliar	
3	Sulawesi	0,22 juta	
4	Jambi	1,1 Miliar	
Sumber	Kementrian ESDM, 2019, diolah		

PERTEMUAN KE 3:

KEBIJAKAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL TENTANG CLIMATE CHANGE

Secara Nasional Indonesia sebagai *National Focal Point (NFP)*

Secara Internasional Indonesia sebagai bagian UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*)

UNFCCC saat ini berjumlah 194 negara, dan bersifat mengikat.

Indonesia telah meratifikasi UNFCCC dengan Undang Undang No. 6 Tahun 1994, dan meratifikasi kesepakatan Kyoto Protokol melalui UU No. 17 Tahun 2007

Integrasi regulasi Internasional thd Kebijakan Domestik

Implementasi dari kesepakatan di tingkat internasional tersebut memerlukan penterjemahan kedalam konteks pembangunan nasional (internalisasi).

Mendukung pembangunan berkelanjutan (SD) dan mengarus-utamakan prinsip rendah emisi (LEC) dan resilien (elastis) terhadap perubahan iklim

Efektivitas pengendalian perubahan iklim juga sangat bergantung pada kebijakan dan 'measure' di semua level (internasional, regional, nasional, dan sub-nasional)

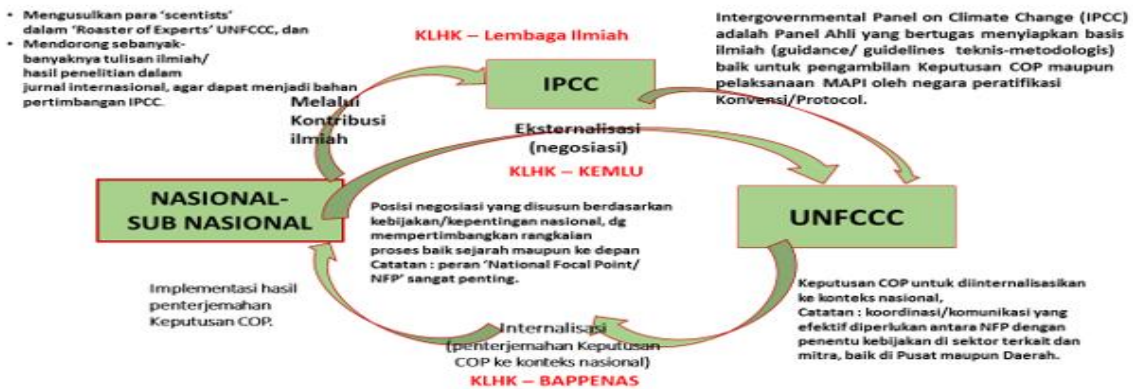
Di tingkat internasional terutama terkait dengan komitmen negara maju yakni:
 untuk mengurangi emisi,
 Komitmen untuk menyediakan dukungan finansial, teknologi,
 dan peningkatan kapasitas
 Pada upaya-upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan oleh negara berkembang
 dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.

Pengimplemntasiannya Meliputi:

- fungsi koordinasi,
- sinergi,
- integrasi dan fungsi leadership
- termasuk monitoring,
- pelaporan dan verifikasi
- pelaksanaan mitigasi

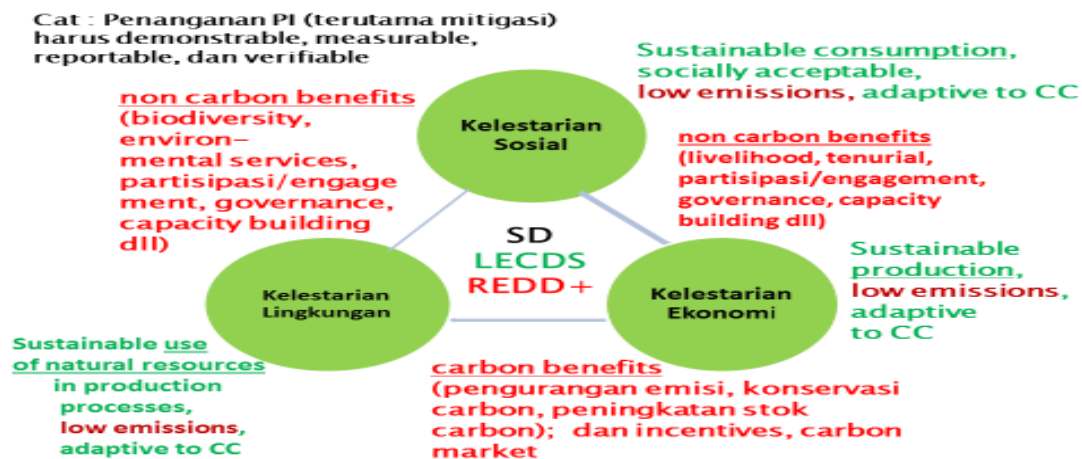
dan adaptasi perubahan iklim.

Siklus Kebijakan Nasional dan Internasional tentang *Climate Change*



- Proses pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional (pusat dan daerah), serta di tingkat internasional,
- merupakan proses yang terus menerus, serta koordinatif, sinergis dan integratif dalam mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pengendalian Perubahan Iklim dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan. (Sumber gambar: DJ PPI, 2019)



- Secara Nasional penanganan perubahan iklim bukan hanya menurunkan dan pencegahan emisi atau peningkatan cadangan karbon, tetapi ada manfaat non karbon yang perlu diperhitungkan seiring dengan manfaat penurunan emisi.

Perubahan Iklim dan SD

- Program penanganan perubahan iklim dalam kerangka pembangunan berkelanjutan meliputi tiga pilar yaitu: pilar lingkungan, pilar ekonomi, dan pilar sosial

PERTEMUAN KE 4, 5:

PENYUSUNAN KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA (SUATU PENDEKATAN IPTEK).

- **Pendahuluan,**
- Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dinilai rentan terhadap pengaruh perubahan iklim.
- Sembilan dari 15 negara yang paling berisiko mengalami bencana alam, termasuk bencana alam karena perubahan iklim, merupakan negara kepulauan (Resiko Dunia, 2018).

Mitigasi bencana suatu keniscayaan dalam sebuah kebijakan

- **Penelitian yang tercantum dalam Laporan Risiko Dunia 2018 menganalisis risiko bencana alam, tsunami, badai siklon tropis dan banjir di 172 negara dan**

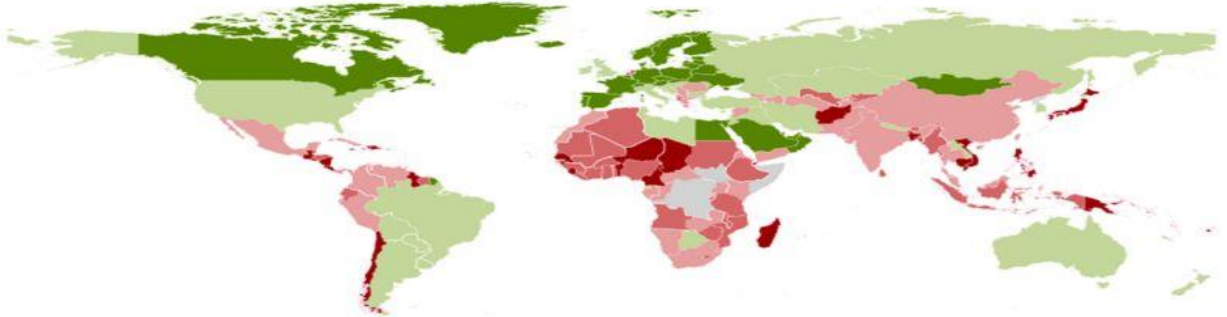
Juga menakar kapasitas masing-masing negara dalam menangani bencana.

<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-4643186> Penelitian Universitas Ruhr Bochum, Jerman, dan koalisi LSM kemanusiaan Jerman, Development Helps Alliance

World Risk Index

As a result of exposure and vulnerability

Very low Low Medium High Very high No data



Source: Bündnis Entwicklung Hilft 2018

BBC

perlu kebijakan mitigasi menghadapi bencana alam ekstrem, dengan menggunakan contoh positif dari negara-negara Eropa

- Ketika mengalami gelombang panas yang terjadi selama musim semi dan musim.

Gelombang panas di benua Eropa itu menyebabkan kekeringan yang berdampak langsung pada pertanian.

Indonesia ditempatkan di urutan ke-36 dengan indeks risiko 10,36, di bawah India dan Islandia

Negara paling berisiko tinggi adalah Jepang dan Chile

Sementara Negara yang paling berisiko rendah adalah Qatar

Contoh-contoh Implementasi Mitigasi Bencana thd *Climate Change* Indonesia

- Larangan pembakaran hutan, UU RI nomor 32 ttg Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- Pasal 108; “ Setiap orang dilarang melakukan pembakaran hutan dengan cara membakar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah”
- **Kasus Besar Pernah Terjadi di Indonesia thn 2015 di Jambi**
- "Kebakaran (lahan gambut) sangat mengganggu, dampaknya sangat buruk, terutama bagi perekonomian masyarakat dan juga mengganggu kesehatan dan pendidikan anak-anak,"
- UU nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan.
- Apalagi Indonesia terkenal dengan julukan “Paru Paru Dunia”
- Khususnya dalam mengurangi dampak CC
- Sekalipun kasus2 Indonesia masih perlu banyak mitigasi Kebijakan.
- <https://wri-indonesia.org/id/blog/>

- **Pertambangan Illegal Kabupaten Gunung Mas dan Pulang Pisau Kalteng**



Kasus di Sumatera Barat

Penebangan hutan seluas 58 Ha ini terindikasi terjadi di Kecamatan Lunang, Pancung Soal, dan Basa Ampek Balai Tapan, Sumatera Barat, yang bersebelahan dengan perkebunan kelapa sawit yang sudah ada sebelumnya, sehingga terlihat tanda-tanda untuk perluasan perkebunan tersebut.



Penebangan liar dan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan diakui oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu **tantangan utama** dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan di Kabupaten tersebut.

▫ Kasus Dompu dan Bima

13:01 [status icons] Penebangan hutan seluas 58 Ha ini terlihat melalui citra satelit untuk perluasan kegiatan pertanian. Citra satelit di bawah ini menunjukkan perubahan fungsi lahan dari hutan, pembukaan lahan, hingga penanaman untuk pertanian.



Pembukaan kawasan hutan untuk bercocok tanam diberitakan marak terjadi di Kabupaten **Dompu** dan **Bima**. Pembukaan lahan tak terkendali ini disinyalir sebagai penyebab terjadinya **bencana banjir**

▫

Kab Muko Muko Provinsi Jambi



TNKS merupakan salah satu taman nasional yang ditetapkan UNESCO pada tahun 2004 sebagai Situs Warisan Dunia Hutan Hujan Tropis Sumatera (Tropical Rainforest Heritage of Sumatera). Namun, pada tahun 2011, UNESCO menetapkan situs tersebut sebagai Warisan Dunia dalam Ancaman (World Heritage in Danger). Ancaman yang menjadi



POKOK BAHASAN 6, DAN 7

INSTITUSI NASIONAL DAN INTERNASIONAL DALAM CC/TANGGUNG JAWAB

- 1. *Green Climate Fund (GCF)* adalah entitas dari mekanisme keuangan.
- Lembaga ini berperan dalam pengajuan pendanaan Internasional.
- 2. Selain Lembaga Terakreditasi (*Accredited Entity/AE*), ada juga yang disebut *National Designated Authority (NDA)*.
- Keduanya adalah komponen utama dalam akses pendanaan GCF.
- NDA merupakan badan dibawah Kemenkeu yang diberi kewenangan mendisain kebijakan fiskal untuk perubahan iklim.
- GCF mendanai sejumlah Wilayah di dunia yang diharapkan dapat membawa dampak dari kebijakan strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

- Salah satu contoh adalah di Indonesia Strategi Sustainable pembangunan berkarbon rendah menekankan pada pola usaha
- 1. Meminimalisir sumber daya alam energi tak terbarukan,
- 2. meminimalisir sumber daya alam tak terdaurkan,
- 3. minimalisasi limbah cair, gas dan padat
- 4. maksimalisasi sumber daya alam terdaurkan,
- 5. reduce, reuse, recycle, recover resources dan limbah,
- 6. maksimalisasi teknologi clean and green,
- 7. optimalisasi ruang lahan spatial.
- Dampak strategis mitigasi, pendanaan GCF diharapkan dapat mengurangi emisi dari pembangkit energi, transportasi, penggunaan hutan dan lahan, serta bangunan, perkotaan, industri, dan peralatan.
- Sedangkan untuk dampak strategis adaptasi, pendanaan GCF diharapkan dapat meningkatkan ketahanan dari kesehatan pangan dan air, mata pencaharian masyarakat dan komunitas, ekosistem, infrastruktur, dan lingkungan.
- Secara resmi GCF mulai beroperasi pada 2015
- Berkantor pusat di Songdo, Korea Selatan.
- 3. *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* didirikan di Cancun, Meksiko tahun 2010.

BUKU

- *Adapting to Climate Change in Europe Exploring Sustainable Pathways - from Local Measures to Wider Policies* **Book** • 2018, Hand Sanderson
- *Biological and Environmental Hazards, Risks, and Disasters A volume in Hazards and Disasters Series* **Book** • Second Edition • 2023 Ramesh Sivanpilai

- Integrasi Kebijakan Regional berbasis Kemiskinan, UMSU Press 2022.
Mohd. Yusri
- Kebijakan Publik, Michael N Dun, 2023, Aksara Prima